

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

10

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Minta Kejelasan, Pemenang Tender Proyek 2018 Datangi PUPR

KOTABUMI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara (Lampura) melakukan pertemuan dengan rekanan, terkait pekerjaan yang belum dibayarkan tahun anggaran 2018 lalu.

Sejumlah paket proyek yang telah dilelang pihak PUPR Lampura tersebut sudah ada pemenangnya masing-masing. Pasalnya lelang proyek tersebut telah melalui persetujuan pejabat terkait atau ditandatangani PPK dan PPAK. Guna penyelesaiannya, Dinas PUPR dan pihak rekanan melakukan pertemuan membahas hal tersebut kemarin (27/1). "Kami berharap ada solusi terhadap nasib rekanan ke-

depan, sebab permasalahan ini sudah lama. Tapi belum menemui titik terang," kata salah seorang perwakilan rekanan, Rasyid.

Menurutnya, ada beberapa perwakilan rekanan terhadap pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Sehingga tak ada yang dirugikan, baik itu dari sisi pemerintah daerah maupun rekanan pemenang lelang proyek 2018 lalu. "Dari kami ada dua point diusulkan, yakni dilaksanakan adendum kontrak kegiatan 2018 atau pemutusan kontrak 2018. Dari Pemerintah Daerah, diwakili oleh pejabat Dinas PUPR para PPK dan PPAK selaku pejabat sepakat me-

lanjutkan proyek itu sesuai arahan Pemkab," ujarnya.

Sekertaris Dinas PUPR Lampura, Rohim mengatakan, pihak rekanan meminta kepastian paket proyek yang telah dilelang itu. Apakah proyek itu bisa berlanjut atau tidak. "Mereka datang ke sini untuk meminta kepastian pekerjaan tersebut," kata Rohim, didampingi Allan Arsil selaku Plt. Kasi Bina Marga PUPR Lampura. Ia mengatakan, pada tahun 2018 lalu, ada beberapa persoalan yang mengakibatkan kerjasama dengan rekan kontraktor terhambat. Sehingga pada tahun itu, pelelangan proyek di Lampura telah terbagi menjadi tiga bidang dan tiga sisi antara

lain, pekerjaan yang tidak terselesaikan, pekerjaan yang sudah terselesaikan, dan pekerjaan 0 persen dalam arti belum dikerjakan sama sekali.

Kemudian ada beberapa instruksi yang diberikan oleh bupati saat masih dijabat Agung Ilmu Mangku Negara kepada Syahbudin mantan Kadis PUPR kala itu untuk memberhentikan sementara pekerjaan proyek tersebut. Dengan alasan masih menunggu hasil audit oleh PPK ataupun Inspektorat Lampura.

"Tapi tetap saja, pada tahun 2018 itu, ada beberapa dari rekanan kontraktor yang masih menjalankan pekerjaannya dengan modal

sendiri," kata Allan lagi.

Dijelaskan juga, dari 226 perusahaan belum juga ada kepastian pembatalan atau perpanjangan kontrak. "Hal itulah yang menjadi persoalan para rekan kita ini, mendatangi Dinas PUPR ini," kata Allan.

Dari hasil pertemuan itu, untuk sementara Dinas PUPR akan melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas PUPR Lampura, Syahrizal Adhar yang kebetulan saat ini di luar kota.

"Setelah kita laporan ke kepala dinas, nantinya dilaporkan kembali ke Bupati Lampura Bapak Budi Utomo, untuk segera mencari solusinya," pungkasnya. (ozy/ci/nca)